

Received: 17 Januari 2026  
Accepted: 29 Januari 2026  
Published: 30 Januari 2026

## **RESPON RUSIA DALAM MENANGGAPI PERLUASAN NATO DI EROPA TIMUR (1999-2022)**

**Dyandara Sekar Pradipta**

International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas  
Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jakarta, Indonesia  
**2110412214@mahasiswa.upnvj.ac.id**

**I Nyoman Aji Suadhana Rai**

International Relations Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas  
Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jakarta, Indonesia  
**nyoman\_rail3@upnvj.ac.id**

### ***Abstract***

*This research aims to comprehensively analyze how Russia has responded to NATO's expansion in Eastern Europe during the 1999–2022 period. By applying the theories of Offensive Realism and the Security Dilemma concept, this study seeks to explain the dynamic action–reaction relationship between NATO's enlargement policies and Russia's defense strategies within the post–Cold War geopolitical context. This research employs a qualitative method with a descriptive–analytical approach, supported by a structured interview with Alexey Golovanov, Counselor at the Embassy of the Russian Federation in Jakarta, representing the Embassy of the Russian Federation to the Republic of Indonesia, as well as an extensive literature review of various secondary sources such as policy documents, military reports, and academic publications. The findings indicate that Russia's responses have undergone significant transformation—from defense diplomacy strategies in the early 2000s to a more confrontational policy under Vladimir Putin's leadership. This shift is reflected in large-scale military modernization, the strengthening of strategic alliances such as the CSTO and SCO, and direct involvement in armed conflicts in Georgia (2008), Crimea (2014), and Ukraine (2022). These findings suggest that Russia's policy is not merely a reaction to external threats but represents a long-term strategy to preserve its geopolitical influence and maintain a balance of power with NATO in the Eastern European region.*

**Keywords:** *Russia, NATO, Expansion, Security Dilemma, Offensive Realism.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana Rusia merespons proses perluasan NATO di kawasan Eropa Timur selama periode 1999–2022. Melalui penerapan teori Realisme Ofensif dan konsep *Security Dilemma*, penelitian ini berupaya menjelaskan dinamika aksi–reaksi antara kebijakan ekspansi NATO dan strategi pertahanan Rusia dalam konteks geopolitik pasca-Perang Dingin. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif–analitis, yang didukung oleh wawancara terstruktur dengan Alexey Golovanov, Konselor Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, sebagai perwakilan Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia, dan studi literatur terhadap berbagai

sumber sekunder seperti dokumen kebijakan, laporan militer, dan publikasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons Rusia mengalami perubahan signifikan dari strategi diplomasi pertahanan pada awal 2000-an menuju kebijakan konfrontatif di bawah kepemimpinan Vladimir Putin. Hal ini tercermin dalam langkah modernisasi militer besar-besaran, penguatan aliansi strategis seperti CSTO dan SCO, serta keterlibatan langsung dalam konflik bersenjata di Georgia (2008), aneksasi Krimea (2014), dan invasi ke Ukraina (2022). Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan Rusia bukan sekadar reaksi terhadap ancaman eksternal, tetapi merupakan strategi jangka panjang untuk mempertahankan pengaruh geopolitiknya dan menyeimbangkan kekuatan dengan NATO di kawasan Eropa Timur.

Kata kunci: *Rusia, NATO, Ekspansi, Security Dilemma, Realisme Ofensif.*

## **Pendahuluan**

Pasca berakhirnya Perang Dingin, sistem internasional menyaksikan konfigurasi dramatis terhadap tatanan kekuasaan global. Uni Soviet yang bubar pada tahun 1991 menciptakan kekosongan geopolitik di Eropa Timur dan Eurasia yang segera menjadi medan persaingan pengaruh antara Rusia sebagai pewaris hegemonik wilayah tersebut, dan blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat melalui institusi militernya, NATO. Dalam konteks ini, pendekatan realisme ofensif, sebagaimana dirumuskan oleh John Mearsheimer (2001) dalam karyanya "*The Tragedy of Great Power Politics*", memberikan kerangka teoritis yang kuat untuk memahami kebijakan luar negeri Rusia sebagai negara besar (*great power*) yang berada dalam sistem internasional anarkis dan berusaha memaksimalkan kekuatannya untuk menjamin kelangsungan dan keamanannya.

Menurut realisme ofensif, negara-negara besar tidak hanya bertindak secara defensif, tetapi juga berupaya memperluas kekuasaan mereka sebisa mungkin dalam lingkungan internasional yang tidak memiliki otoritas tertinggi. Logika ini menempatkan Rusia dalam posisi yang secara struktural terdorong untuk menantang ekspansi NATO yang dianggap sebagai ancaman terhadap *sphere of*

*influence* tradisionalnya. Sejak 1999, ketika NATO mengintegrasikan Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko sebagai anggota baru, Rusia melihat dinamika ini bukan sekadar bentuk perluasan organisasi multilateral, melainkan sebagai langkah sistematis yang mengikis *status quo* strategis yang sebelumnya berimbang. Proses ini mempercepat transformasi postur Rusia dari kekuatan defensif pasca-Soviet menjadi aktor yang aktif mengartikulasikan kepentingannya secara koersif.

Perluasan NATO pada tahun 1999 merupakan titik balik penting dalam lanskap keamanan Eropa. Langkah ini dipandang oleh Rusia sebagai pelanggaran terhadap pemahaman pasca-Perang Dingin yang secara implisit menyepakati bahwa NATO tidak akan memperluas wilayahnya ke arah timur. Dalam pidatonya, para pejabat Rusia seperti Yevgeny Primakov dan bahkan Boris Yeltsin mengungkapkan rasa frustrasi mendalam terhadap langkah Barat ini, yang dianggap telah mengabaikan sensitivitas keamanan Rusia (Smith, 2010). Mearsheimer (2001) menegaskan bahwa dalam kerangka anarki internasional, negara tidak akan bersandar pada niat baik pihak lain, tetapi pada distribusi kekuasaan dan posisi strategis. Oleh karena itu, perluasan NATO, betapapun diplomatis pembenarannya, diterima oleh Rusia

sebagai bentuk penetrasi kekuatan yang harus ditanggapi melalui reposisi strategis.

Rangkaian *turning point* dari periode 1999 hingga 2022 menunjukkan pola yang sangat jelas dalam perilaku Rusia: setiap kali NATO bergerak lebih dekat ke perbatasan Rusia—baik secara simbolik melalui perluasan keanggotaan maupun secara praktis melalui pelatihan dan kerja sama militer—Rusia menanggapi dengan peningkatan militerisasi, pembangunan aliansi tandingan, dan pada akhirnya, penggunaan kekuatan secara langsung. Pola ini secara konsisten sesuai dengan premis dasar realisme ofensif, yang menyatakan bahwa dalam sistem internasional yang anarkis, negara besar akan bertindak agresif untuk menjamin keamanan jangka panjangnya dengan memaksimalkan kekuasaan dan menghambat pertumbuhan kekuasaan lawan.

Selain pendekatan realisme ofensif, fenomena ini juga dapat dilihat dari lensa konsep *security dilemma* yang dikemukakan oleh John Herz pada tahun 1950 melalui tulisannya berjudul “*Idealist Internationalism and the Security Dilemma*”. Dimana konsep ini menjelaskan bagaimana tindakan defensif satu negara dapat secara tidak sengaja mengancam negara lain, yang pada gilirannya akan

mengambil tindakan serupa demi keamanannya sendiri. Akibatnya, kedua pihak terperangkap dalam lingkaran aksi-reaksi yang semakin meningkatkan ketegangan (Herz, 1950; Jervis, 1978). Dalam konteks hubungan Rusia-NATO, dilema keamanan ini sangat nyata. NATO mengklaim ekspansinya sebagai bentuk peningkatan stabilitas dan keamanan kolektif di kawasan, namun Rusia menafsirkan langkah itu sebagai ancaman terhadap *sphere of influence* dan keamanan nasionalnya.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan **penelitian kualitatif deskriptif** dengan menggunakan **pendekatan studi kasus**.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui **wawancara** (*interview*), menurut Christopher Lamont, sebagaimana yang dikutip oleh Umar Surryadi Bakry (Bakry, 2016) metode wawancara untuk penelitian hubungan internasional dibagi menjadi 3 (tiga) yang pertama adalah wawancara terstruktur, dimana wawancara dengan mengumpulkan data melalui berbagai mekanisme, salah satunya ada *focus group discussion* (FGD), melalui FGD wawancara berpedoman pada naskah atau sangat berhati – hati karena setiap penyimpangan dari naskah akan

mendistorsi temuan. Dalam hal ini peneliti tidak menggunakan wawancara terstruktur dikarenakan metode pengambilan data melalui mekanisme ini memakan waktu biaya dan tenaga untuk mengumpulkan data. Kedua adalah wawancara semi-terstruktur, dalam metode wawancara ini peneliti diwajibkan untuk menyasar para Elite. Wawancara ini sering disebut dengan wawancara elite. Wawancara ini bisa dilakukan dengan referensi silang antar partisipan wawancara. Wawancara jenis ini peneliti tidak pakai karena peneliti kesulitan untuk menentukan siapa kalangan elite yang terdapat di kedutaan Rusia di Indonesia. Oleh karena itu peneliti menggunakan wawancara yang ketiga. Wawancara yang ketiga adalah wawancara tidak terstruktur, metode wawancara ini biasa kita jumpai karena menggunakan metode *free flowing conversation* atau percakapan yang mengalir bebas, wawancara ini bertujuan untuk memunculkan tapa perspektif melalui pertanyaan terbuka sederhana namun luas, metode ini yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data dari sumber primer terutama berasal dari lingkungan kedutaan besar Rusia di Jakarta yang dimana tidak diketahui apakah individu tersebut adalah kelompok elite atau individu yang khusus. Peneliti juga menggunakan **studi kepustakaan** (*library research*). Data yang

dikumpulkan berasal dari **sumber primer** yaitu wawancara dengan perwakilan Kedutaan Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia dan berbagai **sumber sekunder** yang relevan, seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan luar negeri, publikasi resmi dari lembaga internasional (misalnya NATO, Kementerian Pertahanan Rusia, dan PBB), serta laporan riset dari lembaga *think tank* yang kredibel, asal sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti adalah berasal dari sumber – sumber internet yang diberikan secara langsung oleh informan yang peneliti sudah wawancarai sebelumnya. Sumber sumber yang berasal dari informan tersebut kemudian penulis gunakan triangulasi data untuk memverifikasi data yang ditemukan di internet dengan pertanyaan dari wawancara yang tidak terstruktur di atas. Kemudian, ditambahkan dengan pengumpulan data dari internet dan perpustakaan.

## **Pembahasan**

### **Gelombang Pertama Perluasan NATO Tahun 1999**

Perluasan NATO pada tahun 1999 menandai titik balik kritis dalam tatanan keamanan Eropa pasca-Perang Dingin. Tiga negara—Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko—secara resmi bergabung ke dalam aliansi militer tersebut, sebuah

langkah yang di satu sisi dipandang oleh NATO sebagai upaya memperluas zona stabilitas dan demokrasi di kawasan Eropa Tengah dan Timur, namun di sisi lain ditafsirkan oleh Rusia sebagai awal dari eksklusif strategisnya dari sistem keamanan regional yang baru terbentuk.

Mengutip pernyataan Alexey Golovanov, Konselor Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, yang didapat dari hasil wawancara dengan penulis:

*“Russia not only tried to build friendly relations with NATO but also officially requested to join the Alliance on several occasions”*

Pernyataan ini menunjukkan signifikansi yang mendalam dalam kerangka analisis hubungan Rusia–NATO. Ucapan ini secara langsung menegaskan bahwa pada fase awal pasca-Perang Dingin, Rusia tidak serta-merta menempatkan dirinya sebagai aktor revisionis atau konfrontatif. Sebaliknya, Rusia justru berupaya menempuh jalur kooperatif dengan NATO, bahkan sampai pada taraf mengajukan permohonan resmi untuk menjadi bagian dari aliansi tersebut.

Dari perspektif *security dilemma*, pernyataan ini menunjukkan adanya *mistrust gap* antara intensi Rusia dengan persepsi negara-negara Barat. Rusia ingin

menunjukkan bahwa dirinya adalah *status quo seeker* yang bersedia bekerja sama dalam menjaga stabilitas Eropa, tetapi ekspansi NATO justru diinterpretasikan sebagai sinyal eksklusif politik dan penolakan struktural terhadap aspirasi Rusia (Jervis, 1978; Booth & Wheeler, 2008). Akibatnya, sikap awal Rusia yang kooperatif kemudian berubah menjadi lebih defensif dan bahkan konfrontatif, seiring dengan berkembangnya persepsi ancaman dari NATO.

Evaluasi efektivitas tindakan Rusia pada fase ini menunjukkan kegagalan dalam membangun pencegahan strategis. Hal ini kemudian mendorong Rusia untuk meninggalkan pendekatan simbolik dan beralih ke pendekatan koersif dan ofensif pada dekade berikutnya, sebagaimana terlihat dalam konflik Georgia, Krimea, dan Ukraina. Dengan demikian, tahun 1999 adalah pondasi awal dari transformasi besar dalam orientasi kebijakan luar negeri dan pertahanan Rusia.

### **Perang Rusia - Georgia Tahun 2008**

Konflik bersenjata antara Rusia dan Georgia pada Agustus 2008 tidak dapat dilepaskan dari latar belakang geostrategis dan diplomatik yang memuncak, terutama akibat keputusan yang diambil dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) NATO di Bucharest, Rumania, pada April 2008.

Dalam pertemuan tersebut, aliansi menyatakan bahwa Ukraina dan Georgia “akan menjadi anggota NATO” di masa depan—sebuah deklarasi yang tidak memberikan jalur keanggotaan formal (*Membership Action Plan*), tetapi memiliki implikasi simbolis dan strategis yang sangat besar.

Konflik ini berakar pada ketegangan panjang antara Georgia dan dua wilayah separatis, Abkhazia dan Ossetia Selatan. Memanfaatkan hal ini, Rusia melakukan intervensi militer terhadap Georgia, yang meletus sebagai perang lima hari pada Agustus 2008. Presiden Georgia, Mikheil Saakashvili, mencoba merebut Ossetia Selatan—wilayah separatis pro-Rusia—yang pada saat itu memang tengah menjadi titik konflik beku (*frozen conflict*). Pasukan Rusia berhasil memukul mundur militer Georgia dan memperkuat posisi *de facto* Abkhazia dan Ossetia Selatan sebagai wilayah yang terpisah dari Georgia.

Mengutip pernyataan Alexey Golovanov, Konselor Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, yang didapat dari hasil wawancara dengan penulis:

*“Russia’s participation in the ‘Partnership for Peace’ program was suspended in April 2014, and since then, all practical cooperation within this program, as well as*

*between Russia and NATO in general, has been frozen.”*

Secara teoritis, penghentian partisipasi ini dapat dipahami sebagai kegagalan mekanisme diplomasi pertahanan untuk menahan laju *security dilemma*. Alih-alih meredakan ketegangan, *Partnership for Peace program* runtuh akibat memburuknya persepsi ancaman pasca ekspansi NATO. Rusia menilai bahwa langkah NATO mendukung perubahan politik di Kyiv serta memperluas pengaruhnya ke kawasan yang dianggap sebagai *sphere of influence* Rusia justru mengabaikan prinsip kesetaraan yang seharusnya menjadi landasan *Partnership for Peace program*. Akibatnya, forum kerja sama militer yang semula dimaksudkan untuk membangun kepercayaan justru runtuh karena hilangnya “*fundamental trust*”, memperburuk spiral kecurigaan, dan memperkuat logika realisme ofensif.

Dalam konteks *security dilemma*, konflik ini mencerminkan spiral ketidakpercayaan yang semakin dalam. Georgia memandang integrasi ke NATO sebagai perlindungan terhadap agresi Rusia, sementara Rusia melihat langkah itu sebagai ancaman langsung. Ketidakpastian niat dan persepsi ancaman yang asimetris menyebabkan kedua pihak saling memperkuat logika pertahanan masing-



masing. Hal inilah yang menjadikan konflik tidak terhindarkan.

Jika dievaluasi dari sudut pandang efektivitas, maka tindakan Rusia dalam konflik ini berhasil mencapai beberapa tujuan strategis. Pertama, Rusia berhasil mencegah integrasi Georgia ke NATO secara formal. Setelah 2008, keanggotaan Georgia menjadi isu yang lebih kontroversial dan tidak lagi menjadi prioritas utama bagi aliansi. Kedua, Rusia berhasil mengirimkan pesan strategis yang jelas kepada negara-negara tetangga bahwa upaya mereka untuk berpaling ke Barat tidak akan tanpa konsekuensi. Hal ini memiliki efek *deterrence* terhadap negara-negara seperti Moldova dan Belarusia, yang menjadi lebih hati-hati dalam kebijakan luar negerinya.

Namun, keberhasilan ini tidak tanpa biaya. Rusia dikucilkan dalam banyak forum internasional, dan hubungannya dengan NATO mencapai titik terendah pasca-Perang Dingin. Ketergantungan Rusia pada pendekatan militer juga memperlemah kemampuan diplomatik jangka panjangnya, dan mempersempit ruang negosiasi di masa depan. Meskipun demikian, dalam kerangka realisme ofensif, hasil ini tetap bisa dianggap rasional. Negara besar tidak terlalu peduli dengan reputasi jangka pendek jika posisi

strategisnya bisa diperkuat. Rusia tidak bertujuan menciptakan stabilitas universal, tetapi mengamankan hegemoninya di lingkup pengaruhnya sendiri.

### **Aneksasi Krimea Tahun 2014**

Aneksasi Krimea oleh Rusia pada Maret 2014 merupakan salah satu titik balik paling signifikan dalam dinamika keamanan global pasca-Perang Dingin. Langkah ini tidak hanya menandai perubahan mendalam dalam strategi pertahanan Rusia, tetapi juga menjadi manifestasi dari transformasi menyeluruh dalam cara Rusia memandang tata keamanan internasional. Secara strategis, Krimea memiliki nilai militer yang sangat tinggi karena merupakan lokasi Armada Laut Hitam Rusia di pelabuhan Sevastopol. Basis ini tidak hanya memungkinkan proyeksi kekuatan maritim Rusia di Laut Hitam, tetapi juga menjadi pintu masuk strategis menuju Laut Tengah dan Mediterania Timur (Giles, 2016). Tanpa kendali atas Krimea, posisi militer Rusia di kawasan tersebut akan sangat terganggu.

Evaluasi terhadap kebijakan pertahanan Rusia dalam konteks aneksasi Krimea menunjukkan dua sisi koin: efektivitas jangka pendek, namun konsekuensi jangka panjang yang kompleks. Dari sisi keberhasilan taktis dan strategis, Rusia mampu merebut dan



mempertahankan Krimea dalam waktu singkat, tanpa perlu perang terbuka skala besar. Mobilisasi pasukan, operasi informasi, dan manipulasi hukum domestik Ukraina—semuanya dieksekusi dengan presisi yang belum pernah terlihat dalam operasi sebelumnya. Dalam beberapa minggu, Rusia telah menciptakan *fait accompli* yang sulit dibatalkan oleh kekuatan manapun tanpa memicu perang besar (Götz, 2016).

Kendati demikian, dari sudut pandang realisme ofensif, tindakan Rusia dapat dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan utamanya: mempertahankan kontrol atas wilayah strategis dan menegaskan batas-batas hegemoninya. Rusia tidak mementingkan legitimasi internasional selama bisa mengamankan kepentingan vitalnya. Seperti dikemukakan oleh Waltz (1979), dalam sistem internasional yang anarkis, negara akan lebih memilih stabilitas melalui kekuasaan daripada kepercayaan yang rapuh. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pertahanan Rusia pasca-Krimea harus diukur bukan berdasarkan konsensus global, tetapi pada seberapa besar ia mampu mengubah realitas geopolitik sesuai dengan kepentingannya.

### **Invasi Ukraina Tahun 2022**

Invasi Rusia terhadap Ukraina yang dimulai pada 24 Februari 2022 merupakan

klmaks dari eskalasi ketegangan antara Rusia dan Barat yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Keputusan Moskow untuk melancarkan operasi militer skala penuh bukanlah suatu tindakan yang dilakukan secara impulsif, melainkan buah dari akumulasi panjang krisis kepercayaan, perubahan persepsi ancaman, dan kegagalan diplomasi multilateral. Dalam kacamata konsep *security dilemma*, tindakan Rusia mencerminkan puncak dari lingkaran aksi-reaksi strategis antara dua aktor besar, di mana upaya defensif satu pihak dibaca sebagai ofensif oleh pihak lainnya, hingga mencapai titik di mana intervensi militer dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar (Jervis, 1978).

Di sisi lain, konsep *security dilemma* menjelaskan bagaimana interaksi Rusia dan NATO berkembang menjadi konflik terbuka. Kedua belah pihak melihat tindakan lawan sebagai ancaman, meskipun diklaim bersifat defensif. NATO menganggap perluasan dan latihan militernya di Eropa Timur sebagai upaya stabilisasi, tetapi Rusia melihatnya sebagai pengepungan. Rusia kemudian membangun kekuatan militer, yang oleh NATO dipersepsi sebagai agresi. Lingkaran ini terus berulang hingga mencapai titik tak bisa kembali pada 2022 (Jervis, 1978).

Mengutip pernyataan Alexey Golovanov, Konselor Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, yang didapat dari hasil wawancara dengan penulis:

*“The Russia-NATO Council ceased its work in October 2021. Russia suspended the work of its mission to NATO in Brussels in response to the alliance's expulsion of eight Russian diplomats. At present, there are no prospects for resuming the work of the Russia-NATO Council.”*

Pernyataan ini merefleksikan salah satu titik krusial dalam deteriorasi hubungan Rusia dan NATO menjelang eskalasi konflik Ukraina 2022. Secara konseptual, penghentian *NATO-Russia Council* menunjukkan kegagalan salah satu mekanisme diplomasi pertahanan yang sejak awal dirancang untuk mengurangi risiko *security dilemma* melalui transparansi, komunikasi strategis, dan *confidence-building measures*.

Golovanov menekankan dua hal penting: pertama, bahwa penghentian *NATO-Russia Council* bukan semata akibat sikap unilateral Rusia, tetapi respons langsung atas tindakan NATO yang mengusir delapan diplomat Rusia di Brussels. Hal ini memperlihatkan dinamika *tit-for-tat escalation*, di mana langkah konfrontatif NATO memicu tindakan balasan Rusia, memperburuk spiral

ketidakpercayaan sebagaimana dijelaskan dalam konsep *security dilemma* (Jervis, 1978). Kedua, pernyataannya mengenai *“no prospects for resuming”* menegaskan bahwa Rusia sudah kehilangan kepercayaan pada kredibilitas mekanisme diplomatik NATO, sehingga jalur diplomasi pertahanan formal digantikan oleh pendekatan lain, seperti retorika defensif, aliansi strategis dengan Tiongkok dan CSTO, serta modernisasi militer.

### **Modernisasi Militer**

Pasca-keruntuhan Uni Soviet, Angkatan Bersenjata Rusia mengalami penurunan drastis dalam hal kapasitas tempur, organisasi, dan moral institusional. Transisi dari sistem komando terpusat Soviet ke struktur negara baru yang dilanda krisis ekonomi dan politik menyebabkan keterpurukan sektor pertahanan nasional. Namun, seiring dengan pulihnya kekuatan politik Rusia pada akhir 1990-an di bawah kepemimpinan Vladimir Putin, Rusia mulai merumuskan kembali arah kebijakan pertahanannya. Salah satu langkah fundamental adalah dimulainya proses modernisasi militer secara bertahap, yang kemudian diformalkan dalam bentuk *State Armament Program* (SAP).

SAP merupakan pilar utama dari strategi pertahanan jangka panjang Rusia. Program ini pertama kali dirancang pada

awal dekade 2000-an dan diperkuat melalui iterasi berikutnya seperti SAP-2020 dan SAP-2027. Tujuan utama SAP adalah untuk memperbarui sekitar 70% peralatan militer yang dianggap usang dan tidak efektif dalam menghadapi tantangan kontemporer, serta memperkuat kemampuan Rusia dalam menghadapi skenario konflik konvensional maupun asimetris (Giles, 2017). SAP awal ditujukan untuk menggantikan peninggalan militer era Soviet dengan platform generasi baru dalam sistem senjata utama, seperti pesawat tempur generasi kelima (Su-57), sistem pertahanan udara S-400, rudal hipersonik Kinzhal dan Avangard, serta peningkatan kemampuan *cyber* dan elektronik.

SAP-2020 difokuskan pada tiga prioritas utama: modernisasi sistem senjata utama, penguatan daya tangkal strategis, dan peningkatan mobilitas serta interoperabilitas pasukan. Kremlin mengalokasikan sekitar 20 triliun rubel dalam kerangka SAP ini, dengan proporsi signifikan diarahkan pada Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Di antaranya, pengadaan tank generasi terbaru seperti T-90 dan versi termodifikasi T-72B3, pembangunan kapal selam strategis kelas Borei dengan rudal nuklir Bulava, serta pengembangan unit-unit pasukan elit seperti VDV dan Spetsnaz, menjadi titik berat modernisasi.

Sebagai kelanjutan dari SAP-2020, Rusia meluncurkan *State Armament Program* 2018–2027 yang bertujuan memperkuat fondasi yang telah diletakkan sebelumnya, sekaligus mengatasi hambatan struktural dan ekonomi yang mengemuka. SAP-2027 tidak sekadar menekankan pada pengadaan senjata, tetapi lebih strategis dalam pendekatan “prioritas selektif” yang menitikberatkan pada pengembangan sistem presisi tinggi, otonomisasi teknologi militer, dan peningkatan integrasi komando lintas matra. Salah satu indikator utama dari SAP-2027 adalah penguatan *deterrence* strategis melalui rudal hipersonik generasi baru, sistem pertahanan udara S-500, serta pemutakhiran teknologi kecerdasan buatan dalam doktrin pertempuran modern.

### **Aliansi Strategis**

Peristiwa aneksasi Krimea oleh Rusia pada tahun 2014 menjadi titik balik dalam pola kerja sama strategis yang dijalankan Moskow, khususnya dalam dua dimensi: (1) fragmentasi hubungan dengan Barat, dan (2) akselerasi integrasi dengan mitra non-Barat. Isolasi internasional yang dihadapi Rusia sebagai konsekuensi dari aneksasi tersebut mendorong pergeseran besar-besaran dalam kebijakan aliansi strategis. Jika sebelum 2014 Rusia masih berupaya menjaga dualitas hubungan antara Timur dan Barat, maka pasca-2014 Rusia

sepenuhnya memfokuskan orientasinya pada konsolidasi aliansi non-Barat.

Dalam kerangka kebijakan luar negeri dan pertahanan Rusia, pembentukan dan penguatan aliansi strategis menjadi respon penting terhadap dinamika sistem internasional yang dianggap semakin tidak bersahabat, khususnya sejak ekspansi NATO ke Eropa Timur. Salah satu pilar utama dari strategi ini adalah penguatan *Collective Security Treaty Organization* (CSTO) dan pendalaman kemitraan strategis dengan Republik Rakyat Tiongkok. Kedua entitas ini menjadi wahana utama bagi Rusia untuk menciptakan blok alternatif terhadap pengaruh militer-politik Barat, serta menjadi instrumen realisasi prinsip realisme ofensif dalam memperluas dominasi kawasan dan membatasi ruang gerak aliansi rival.

CSTO, yang lahir dari Perjanjian Keamanan Kolektif (*Collective Security Treaty*) tahun 1992 dan diresmikan sebagai organisasi permanen pada 2002, terdiri dari negara-negara eks-Soviet seperti Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan, serta Rusia sebagai pemimpin dominannya. Secara struktur, CSTO merupakan replikasi simbolik dari NATO—dengan klausul pertahanan kolektif (mirip Pasal 5 NATO)—namun

funksinya lebih bersifat politik dan simbolik ketimbang militeristik. Meskipun efektivitas CSTO kerap dipertanyakan, keberadaannya penting dalam strategi Rusia untuk menjaga zona pengaruhnya di Eurasia dan mencegah penetrasi militer Barat melalui pakta keamanan bilateral dengan negara-negara bekas Soviet.

Kemitraan strategis dengan Tiongkok mengalami evolusi signifikan dalam dua dekade terakhir. Pasca 2001, hubungan kedua negara mengalami peningkatan melalui pembentukan *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), yang meskipun lebih bersifat multilateral dan regional, mencerminkan sinergi antara Moskow dan Beijing dalam menanggapi unipolaritas global yang dipimpin Amerika Serikat. Sejak aneksasi Krimea pada 2014, dan meningkatnya isolasi Rusia dari forum-forum Barat, hubungan Rusia–Tiongkok bertransformasi dari sekadar kemitraan pragmatis menjadi kemitraan strategis yang asimetris, di mana Rusia bergantung lebih besar pada kerja sama politik, ekonomi, dan militer dengan Beijing.

Di bidang pertahanan, Rusia dan Tiongkok melakukan latihan militer gabungan dalam skala besar seperti Vostok, *Peace Mission*, dan *Joint Sea*, yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan

interoperabilitas militer, tetapi juga menjadi simbol demonstrasi kekuatan bersama kepada dunia Barat. Rusia juga menjadi pemasok utama sistem senjata mutakhir kepada Tiongkok, termasuk sistem pertahanan udara S-400 dan pesawat tempur Su-35 (Gabuev, 2016). Walaupun kerja sama militer ini belum membentuk aliansi formal seperti NATO, intensitas dan simbolismenya menjadikan kemitraan ini sebagai kutub kekuatan baru dalam politik internasional.

Latihan militer gabungan Vostok 2018 menandai lompatan besar dalam pengembangan kerja sama militer antara Rusia dan Tiongkok. Dengan melibatkan lebih dari 300.000 personel, 1.000 pesawat tempur, dan partisipasi aktif Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA), latihan ini merupakan yang terbesar sejak era Perang Dingin. Menurut Weitz (2020), latihan ini mencerminkan munculnya poros militer non-Barat yang berusaha menggeser dominasi unipolar Amerika Serikat dalam arsitektur keamanan global.

### **Serangan Militer dan Retorika Defensif**

Sejak runtuhnya Uni Soviet, Rusia menghadapi tantangan mendasar terkait posisi dan peranannya dalam sistem internasional. Salah satu isu paling krusial adalah ekspansi NATO ke Eropa Timur, yang dipersepsikan oleh Moskow sebagai

ancaman langsung terhadap keamanan nasional. Dalam konteks ini, Rusia mengembangkan strategi ganda: di satu sisi menggunakan kekuatan militer sebagai instrumen untuk melindungi dan menegaskan kembali statusnya sebagai kekuatan besar, dan di sisi lain menyertai tindakan tersebut dengan retorika defensif yang membingkai setiap langkahnya sebagai tindakan protektif, bukan agresif. Retorika defensif berfungsi sebagai legitimasi politik dan hukum, memperkuat dukungan domestik, serta mempengaruhi persepsi internasional (Tsygankov, 2019).

Retorika defensif sendiri dapat dipahami sebagai bentuk narasi politik yang digunakan untuk membenarkan penggunaan kekuatan dengan cara menekankan adanya ancaman eksternal, sehingga intervensi militer tampak sebagai langkah pertahanan, bukan ekspansi. Hal ini sesuai dengan konsep *security dilemma*, di mana negara menganggap perlu memperkuat pertahanannya, namun langkah tersebut justru dipersepsi sebagai ancaman oleh pihak lain (Jervis, 1978). Dalam kasus Rusia, setiap operasi militer yang dilakukan sejak 1999 hingga 2022 selalu dibingkai dengan retorika yang menekankan bahwa Moskow “dipaksa” bertindak untuk menjaga stabilitas kawasan atau melindungi rakyatnya dari ancaman luar.

Gelombang pertama perluasan NATO pada 1999, yang melibatkan Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko, menandai awal dari ketegangan baru dalam hubungan Rusia-Barat. Dari perspektif Moskow, ekspansi ini melanggar kesepakatan informal pasca-Perang Dingin bahwa NATO tidak akan bergerak “satu inci ke timur” (Sarotte, 2010). Presiden Boris Yeltsin dan kemudian Vladimir Putin mengartikulasikan retorika defensif yang menggambarkan ekspansi tersebut sebagai pengkhianatan dan ancaman serius terhadap keamanan nasional Rusia.

Namun pada tahap ini, respons Rusia masih terbatas pada retorika simbolik dan penyesuaian kebijakan militer. Tidak ada intervensi militer langsung, tetapi Rusia memulai proses reformasi dan modernisasi angkatan bersenjata. Program paling penting adalah *State Armament Program* (SAP) 2020, yang menjadi kerangka jangka panjang untuk meningkatkan kesiapan tempur pasca kelemahan militer yang terungkap dalam Perang Chechnya. Retorika yang dibangun menekankan bahwa langkah ini bersifat defensif untuk menjaga stabilitas kawasan, bukan upaya ofensif (McDermott, 2009). Dengan demikian, pada fase 1999, retorika defensif Rusia masih bersifat diplomatis, sementara penggunaan *hard power* lebih diarahkan pada modernisasi internal daripada

proyeksi kekuatan eksternal. Meski demikian, fondasi pola “militarisasi plus retorika” sudah terbentuk.

Konflik Rusia-Georgia pada Agustus 2008 menjadi titik balik penting karena merupakan pertama kalinya Rusia melakukan operasi militer terbuka terhadap negara tetangga pasca-Perang Dingin. Pemicunya adalah upaya Georgia di bawah Presiden Mikheil Saakashvili untuk bergabung dengan NATO, serta eskalasi ketegangan di wilayah separatis Ossetia Selatan dan Abkhazia.

Rusia meluncurkan operasi militer singkat selama lima hari yang berhasil memukul mundur pasukan Georgia. Retorika defensif digunakan untuk membingkai operasi tersebut sebagai langkah protektif: Kremlin menekankan bahwa intervensi dilakukan untuk melindungi warga sipil dan pasukan penjaga perdamaian Rusia yang ditempatkan di kawasan, serta untuk mencegah “genosida” terhadap warga Ossetia (Allison, 2008). Narasi ini memperkuat legitimasi domestik sekaligus mengurangi kritik internal terhadap penggunaan kekuatan militer.

Namun, di mata Barat, retorika defensif Rusia dipandang sebagai kedok untuk menutupi agresi dan ekspansionisme. NATO dan Uni Eropa menganggap



intervensi ini sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Georgia. Dari perspektif realisme ofensif, langkah ini memperkuat persepsi bahwa Rusia tidak segan menggunakan kekuatan militer untuk menghalangi aspirasi integrasi Eropa-Atlantik negara-negara bekas Soviet (Asmus, 2010). Dengan demikian, Perang Rusia–Georgia 2008 menandai transisi dari diplomasi defensif ke serangan militer terbatas yang dibingkai dengan narasi perlindungan. Peristiwa ini adalah contoh awal pola Rusia yang menggabungkan intervensi militer dengan retorika protektif.

Krisis Ukraina 2014, yang dipicu oleh Euromaidan dan jatuhnya Presiden Viktor Yanukovych, membuka babak baru konfrontasi Rusia–Barat. Bagi Rusia, munculnya pemerintahan pro-Barat di Kiev serta potensi akses Ukraina ke NATO dipersepsikan sebagai ancaman strategis yang tak dapat ditoleransi.

Lebih jauh, Rusia menggunakan narasi hukum internasional dengan mengklaim bahwa referendum di Krimea adalah bentuk “hak menentukan nasib sendiri.” Padahal, komunitas internasional menolak klaim ini dan menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Ukraina. Dengan demikian, aneksasi Krimea memperlihatkan bagaimana retorika defensif digunakan tidak hanya

untuk membenarkan tindakan militer, tetapi juga untuk membangun narasi hukum yang melawan dominasi Barat. Secara strategis, peristiwa ini memperburuk hubungan Rusia–NATO. Sejak 2014, kerja sama praktis dalam *NATO–Russia Council* dihentikan, dan Eropa mulai menerapkan sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Rusia.

Retorika defensif Kremlin menekankan dua narasi utama: “denazifikasi” dan “demiliterisasi” Ukraina. Narasi ini dikonstruksi untuk menciptakan legitimasi moral—seolah-olah Rusia melindungi Ukraina dari ekstremisme dan melindungi dirinya dari agresi Barat. Retorika ini berhasil membangun konsensus internal di Rusia, tetapi secara internasional dipandang sebagai propaganda untuk menutupi agresi (Charap & Colton, 2022).

Adapun mengutip pernyataan Alexey Golovanov, Konselor Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, yang didapat dari hasil wawancara dengan penulis:

*“It can hardly be said that NATO relies on a legal basis in its activities. They (mainly the US) demonstratively withdraw from international legally binding agreements on arms control and promote a new terminology convenient for them—a ‘rules-*



*based order,' which they fill with any content they deem necessary."*

Pernyataan Alexey Golovanov tersebut mencerminkan kritik tajam Rusia terhadap dasar normatif yang digunakan NATO dan Amerika Serikat dalam menjalankan aktivitas militernya. Menurut Golovanov, NATO tidak lagi beroperasi dalam kerangka hukum internasional yang berbasis pada perjanjian multilateral yang mengikat secara hukum, melainkan lebih pada kerangka "*rules-based order*"—suatu terminologi politik yang diciptakan dan diinterpretasikan secara sepihak oleh Barat.

Dalam semua *turning point* besar (1999, 2008, 2014, 2022), Rusia secara konsisten menggunakan retorika defensif untuk membenarkan tindakan ekspansionis dan ofensif. Hal ini sejalan dengan pandangan realisme ofensif bahwa tindakan militer sering kali dibingkai dalam narasi defensif guna memperoleh legitimasi politik. Contohnya, invasi Ukraina 2022 diklaim sebagai tindakan pencegahan terhadap ancaman NATO, padahal secara empiris tindakan tersebut merupakan operasi militer konvensional penuh yang mengubah batas-batas negara secara paksa. Retorika menjadi instrumen dominasi, bukan sekadar pembelaan.

Mengutip pernyataan Alexey Golovanov, Konselor Kedutaan Besar

Rusia di Jakarta, yang didapat dari hasil wawancara dengan penulis:

*"Russia does not intend to attack anyone, but the further things go, the more insistently it has to defend its state borders and national interests. Herein lies the tragedy of the situation."*

Pernyataan ini mencerminkan inti dari retorika defensif Rusia dalam menghadapi ketegangan geopolitik dengan NATO dan Barat. Dalam narasi resmi Rusia, kebijakan luar negeri dan pertahanan selalu diproyeksikan sebagai langkah reaktif, bukan agresif. Artinya, setiap tindakan militer atau kebijakan strategis yang diambil Rusia—mulai dari modernisasi militer, aliansi strategis, hingga operasi militer—diposisikan sebagai bentuk perlindungan atas kedaulatan negara dan kepentingan nasional, bukan ekspansi teritorial semata.

Golovanov menekankan adanya dimensi "tragedi" dalam situasi ini, yang merefleksikan dilema keamanan klasik: semakin NATO memperluas pengaruhnya dan memperkuat militernya di dekat perbatasan Rusia, semakin Rusia merasa terancam dan terdorong untuk mengambil langkah-langkah pertahanan yang pada gilirannya dianggap ofensif oleh pihak Barat. Dengan demikian, pernyataan ini menggarisbawahi logika spiral eskalasi:

kedua belah pihak sama-sama menilai tindakannya defensif, tetapi dipersepsikan agresif oleh lawan.

Efektivitas retorika defensif dan strategi *coercive diplomacy* Rusia dalam konteks kebijakan pertahanan dapat dilihat dari dua sisi: keberhasilannya dalam mencapai tujuan taktis, dan dampaknya terhadap posisi strategis jangka panjang. Dari sisi tujuan taktis, retorika defensif Rusia cukup efektif dalam mengkonsolidasikan dukungan domestik, memperkuat narasi nasionalis, dan menciptakan pembenaran atas penggunaan kekuatan militer. Retorika ini juga berfungsi memperkuat posisi tawar Rusia dalam negosiasi, karena membingkai setiap respon Rusia sebagai bentuk perlindungan atas kepentingan vital yang tidak dapat dinegosiasikan.

### **Kesimpulan**

Respons Rusia terhadap perluasan NATO di Eropa Timur selama periode 1999–2022 tidak dapat dipahami sebagai reaksi spontan atau semata-mata bersifat defensif, melainkan merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mempertahankan posisi Rusia sebagai kekuatan besar (*great power*) di kawasan Eurasia. Dalam perspektif realisme ofensif, tindakan Rusia mencerminkan logika dasar sistem internasional yang anarkis, di mana

tidak ada otoritas tertinggi yang menjamin keamanan negara. Oleh karena itu, Rusia memandang ekspansi NATO sebagai ancaman struktural terhadap keamanan nasional, integritas wilayah, dan *sphere of influence* historisnya. Perluasan NATO bukan hanya dipersepsikan sebagai kebijakan keamanan kolektif Barat, tetapi sebagai upaya sistematis untuk menggeser keseimbangan kekuatan dan mengepung Rusia secara strategis.

Pada fase awal pasca-Perang Dingin, Rusia sebenarnya menunjukkan kecenderungan kooperatif dengan Barat. Upaya untuk menjalin kemitraan melalui mekanisme seperti *Partnership for Peace* dan *NATO–Russia Council* menunjukkan bahwa Rusia tidak serta-merta menempatkan NATO sebagai musuh. Bahkan, sebagaimana ditegaskan dalam wawancara dengan Alexey Golovanov, Rusia pernah secara serius mengupayakan integrasi ke dalam arsitektur keamanan Eropa-Atlantik. Namun, dinamika ini berubah ketika NATO tetap melanjutkan proses ekspansi tanpa memberikan ruang institusional yang setara bagi Rusia. Dari sudut pandang Rusia, hal ini mempertegas persepsi eksklusif politik dan strategis, yang kemudian memicu pergeseran orientasi kebijakan luar negeri dari kooperatif menjadi semakin konfrontatif.

*Turning point* penting seperti konflik Rusia–Georgia 2008, aneksasi Krimea 2014, dan invasi Ukraina 2022 menegaskan konsistensi pola perilaku Rusia. Dalam setiap peristiwa tersebut, Rusia menggunakan kekuatan militer sebagai instrumen utama untuk mempertahankan kepentingan strategisnya, sekaligus membingkainya melalui retorika defensif. Retorika ini berfungsi sebagai alat legitimasi politik, baik untuk audiens domestik maupun internasional, dengan menekankan bahwa Rusia “dipaksa” bertindak demi melindungi keamanan nasionalnya. Namun, efektivitas retorika defensif ini bersifat terbatas. Di satu sisi, narasi tersebut berhasil mengonsolidasikan dukungan domestik dan memperkuat identitas nasional Rusia sebagai negara yang sedang “dikepung” oleh Barat. Di sisi lain, retorika ini gagal meyakinkan komunitas internasional, bahkan justru memperkuat citra Rusia sebagai negara agresor.

Modernisasi militer melalui *State Armament Program* (SAP) menunjukkan bahwa respons Rusia tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga dirancang secara sistematis untuk membangun kapasitas jangka panjang. Investasi besar-besaran dalam sistem persenjataan mutakhir, seperti rudal hipersonik, sistem pertahanan udara canggih, dan kemampuan perang siber,

menandakan bahwa Rusia berupaya menciptakan *deterrence* strategis yang kredibel terhadap NATO. Modernisasi ini memperkuat posisi Rusia dalam kerangka realisme ofensif, karena memungkinkan Moskow untuk mempertahankan otonomi strategis dan mencegah dominasi penuh Barat di kawasan Eropa Timur. Namun, pada saat yang sama, modernisasi ini juga memperkuat persepsi ancaman di pihak NATO, sehingga kembali memperdalam dilema keamanan.

Penguatan aliansi strategis, khususnya melalui CSTO dan kemitraan dengan Tiongkok, menunjukkan dimensi lain dari respons Rusia terhadap ekspansi NATO. Aliansi-aliansi ini bukan hanya instrumen militer, tetapi juga simbol politik bahwa Rusia memiliki alternatif terhadap tatanan internasional yang didominasi Barat. Kemitraan Rusia–Tiongkok, terutama pasca-2014, mencerminkan terbentuknya poros kekuatan non-Barat yang berpotensi mengubah konfigurasi geopolitik global. Meski hubungan ini belum berbentuk aliansi formal seperti NATO, intensitas kerja sama militer dan politiknya menunjukkan bahwa Rusia tidak lagi memandang Barat sebagai mitra strategis utama, melainkan sebagai rival struktural.

Dari perspektif efektivitas kebijakan, respons Rusia terhadap ekspansi NATO menunjukkan hasil yang ambigu. Dalam jangka pendek, Rusia relatif berhasil mencapai beberapa tujuan strategisnya, seperti menghambat akses Georgia dan Ukraina ke NATO, mempertahankan kendali atas wilayah strategis seperti Krimea, serta menunjukkan kapasitas militernya sebagai alat *deterrence*. Namun, dalam jangka panjang, kebijakan ini justru membawa konsekuensi yang merugikan posisi strategis Rusia. Isolasi internasional, sanksi ekonomi, serta penguatan kembali NATO sebagai aliansi militer yang lebih solid menunjukkan bahwa tindakan Rusia malah mempercepat konsolidasi kekuatan Barat. Dengan kata lain, strategi berbasis *coercive diplomacy* memang efektif secara taktis, tetapi kontraproduktif secara strategis.

Penelitian ini menegaskan bahwa hubungan Rusia–NATO tidak dapat dijelaskan hanya melalui logika kekuatan material semata, tetapi juga melalui dimensi psikologis, historis, dan simbolik. Trauma geopolitik akibat runtuhnya Uni Soviet, kehilangan status *superpower*, serta pengalaman eksklusi dari arsitektur keamanan Eropa membentuk cara Rusia memandang dunia. Dalam konteks ini, ekspansi NATO menjadi simbol marginalisasi Rusia dalam tatanan

internasional pasca-Perang Dingin. Oleh karena itu, respons Rusia tidak hanya mencerminkan kepentingan keamanan objektif, tetapi juga pencarian pengakuan dan status sebagai kekuatan besar yang setara dengan Barat.

Secara teoritis, temuan penelitian ini memperkuat relevansi realisme ofensif dan konsep *security dilemma* dalam menjelaskan dinamika konflik Rusia–NATO. Realisme ofensif menjelaskan mengapa Rusia cenderung memilih strategi koersif dan ekspansionis dalam menghadapi ancaman, sementara *security dilemma* menjelaskan mengapa konflik ini terus bereskalasi meskipun kedua pihak sama-sama mengklaim bertindak secara defensif. Kombinasi kedua pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana kebijakan keamanan di satu pihak justru memicu rasa tidak aman di pihak lain.

## Referensi

- Gabuev, A. (2022). Russia and China: Axis of convenience or strategic alignment? Carnegie Endowment for International Peace. <https://carnegieendowment.org>
- Gabuev, A. (2022). Russia's axis of autocrats. *Foreign Affairs*, 101(1), 10–20.
- Goldgeier, James, Shiffrinson, & Itzkowitz, J. R. (2020). Evaluating NATO

- enlargement: scholarly debates, policy implications, and roads not taken. *International Politics*, 57(3), 291-321.  
<https://doi.org/10.1057/s41311-020-00243-7>
- Gorenburg, D. (2020). The Future of Russia's Naval Modernization. PONARS Eurasia Policy Memo.
- Kucera, J. (2022). Kazakhstan crisis marks turning point for CSTO. Eurasianet.
- Lo, B. (2022). The Russia-China Axis: The New Cold War and the Future of the Global Order. Penguin Books.
- Mankoff, J. (2022). Empires of Eurasia: How Imperial Legacies Shape International Security. Yale University Press.
- Marten, & Kimberly. (2020). NATO enlargement: evaluating its consequences in Russia. *International Politics*, 57(3), 401-426.  
<https://doi.org/10.1057/s41311-020-00233-9>
- Mearsheimer, J. J. (2022). The causes and consequences of the Ukraine war. Harper Lecture Series. University of Chicago.
- Ministry of Defence of the Russian Federation. (2021). Military doctrine of the Russian Federation.  
<http://eng.mil.ru>
- NATO. (2022). NATO Secretary General's Annual Report 2022.  
<https://www.nato.int/>
- NATO. (2022). Strategic Concept 2022.  
<https://www.nato.int>
- NATO. (2023). Defence Expenditure of NATO Countries (2010–2023).  
[https://www.nato.int/cps/en/natohq/news\\_217256.html](https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_217256.html)
- Putin, V. (2022). Presidential Address to the Nation. <http://kremlin.ru>
- Putin, V. (2024). Speech at the Meeting with Senior Staff of the Russian Foreign Ministry. <http://kremlin.ru>
- Robison, R. R. (2020). NATO burden-sharing: A comprehensive framework for member evaluation. *Comparative Strategy*, 39(3), 299-315.  
<https://doi.org/10.1080/01495933.2020.1740574>
- Russian MFA. (2023). Comment by the Information and Press Department on NATO policy. <https://mid.ru/en/>
- Russian MFA. (2023). On the Settlement of the Crisis in Ukraine.  
<https://mid.ru/en>
- Russian MFA. (2023). Security across the Eurasian Space: The Architecture that Unites. <https://mid.ru/en/>
- Shiffrinson, & Itzkowitz, J. R. (2020). Eastbound and down: The United States, NATO enlargement, and suppressing the Soviet and Western European alternatives , 1990–1992. *Journal of Strategic Studies*, 43(6-7), 816-846.  
<https://doi.org/10.1080/01402390.2020.1737931>

- SIPRI. (2024). Military expenditure database. Stockholm International Peace Research Institute.  
[https://www.sipri.org/databases/mil\\_ex](https://www.sipri.org/databases/mil_ex)
- Taylor, B. D. (2022). The Code of Putinism. Oxford University Press.
- Trenin, D. (2021). Russia. Polity Press.
- Trenin, D. (2021). Russia: A historical introduction from Kievan Rus' to the present. Polity Press.
- Zakharova, M. (2023). Briefing by Foreign Ministry Spokeswoman. Russian Ministry of Foreign Affairs.
- Zubok, V. M. (2022). Collapse: The Fall of the Soviet Union. Yale University Press.